JURNAL PENDIDIKAN IPS
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2428
Vol.15 No.3, September 2025 | ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141

The Influence of Macroeconomic Factors on Government Debt Policy for the 1990-2022 Period

Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Kebijakan Utang Pemerintah Periode 1990-2022

Didi Takwijudin[1)*], Taosige Wau[1)]

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Correspondence: diditakwijudin@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of macroeconomic factors, such a tax ratio, public spending and Gross Domestic Product (GDP) on government debt policy in Indonesia. The data analysis method used is time series data for the period 1990-2022 with annual data using the Error Correction Model (ECM) approach. This research uses a quantitative analysis method with the Eviewes 9 as analysis tool. Based on the results of the overall test of independent variables, it was found that in the short term there are two variables that have a positive influence on debt policy, namely public spending and GDP. Meanwhile, the tax ratio variable has a negative influence on debt policy. This is caused by a low tax absorption ratio resulting in a budget deficit which will increase the debt ratio. However, based on test results using a long-term approach, it was found that all independent variables had a negative influence. So, to reduce the high debt ratio, the government must increase the growth of infrastructure and economic development by paying attention to sources of financing other than debt and paying attention to the direction of debt policy.

Keywords: Tax Rasio; Public Expenditure; GDP; Debt Policy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi dalam hal ini adalah rasio pajak, belanja publik, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap kebijakan utang pemerintah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah data time series selama periode 1990-2022 dengan data annual menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM). Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan alat analisis Eviewes 9. Berdasarkan hasil uji keseluruhan variabel independen ditemukan bahwa dalam jangka pendek terdapat dua variabel yang berpengaruh positif terhadap kebijakan utang yaitu belanja publik dan PDB. Sedangkan variabel rasio pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap kebijakan utang. Hal ini disebabkan oleh rasio penyerpan pajak yang rendah sehingga terjadi defisit anggaran yang akan meningkatkan rasio utang. Namun, berdasarkan hasil uji dengan pendekatan jangka panjang ditemukan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang negatif. Jadi untuk menekan rasio utang yang tinggi pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan selain utang serta memperhatikan arah kebijakan utang.

Kata Kunci : Rasio Pajak, Belanja Publik, PDB, Kebijakan Utang

Received: 19 Sept 2025; **Revised**: 21 Sept 2025; **Accepted**: 21 Sept 2025; **Available Online**: 23 Sept 2025

This is an open access article under the CC - BY license.

PENDAHULUAN

Utang merupakan keseluruhan kewajiban jangka tetap pemerintah kepada pihak lain yang terutang berdasarkan jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup kewajiban dalam dan luar negeri, simpanan mata uang, surat berharga selain saham, dan pinjaman. Ini merupakan kewajiban pemerintah yang dikurangi dengan jumlah ekuitas dan derivatif keuangan yang dimilki oleh pemerintah. Karena utang merupakan persediaan dan bukan aliran, maka utang biasanya diukur pada periode tertentu yang ditetapkan pada hari terakhir tahun fiskal (World

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2428

Bank, 2023). Pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi sebuah alat ukur dalam menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi negara tersebut menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam satuan tahun tertentu (World Bank, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting bagi perekonomian Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya juga menghadapi tantangan yang sama seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran, dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, maka diperlukan pembangunan yang berkelanjutan juga. Dalam hal ini, skema kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan keuangan yang kuat dan diperlukan untuk menjaga defisit fiskal dan utang luar negeri pada tingkat yang berkelanjutan guna memastikan lingkungan makroekonomi yang kondusif (Touseef et al., 2023).

Analisis kebijakan utang suatu negara pada umumnya berfokus pada perilaku rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Blanchard dalam Leão (2013) mengatakan bahwa indikator yang baik yang dapat memberikan gambaran untuk menginterpretasikan kebijakan utang adalah pertumbuhan rasio utang terhadap PDB. Adapun alasan rasionalitas dalam penggunaan rasio tersebut adalah kemampuan dalam menganalisis utang publik yang bergantung pada pemasukan pajak yang diperoleh pemerintah yang secara signifikan bergantung pada nilai PDB. Pembayaran bunga pinjaman utang luar negeri yang dilakukan setiap tahun berdampak pada kesejahteraan dikarenakan pengeluaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional dialihkan untuk membayar bunga utang setiap tahunnya dan pokok utang itu sendiri (Nunu Nugraha & Kamio, 2021).

Sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari penerimaan pajak dan non-pajak. Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas dan pendapatan yang diperoleh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat perlu mendorong pemungutan pajak guna memperoleh peningkatan pendapatan negara (Ibnu Syamsi, 1994). Sebagai penyumbang utama pendapatan negara, peran pajak menjadi sangat strategis untuk kelangsungan pembangunan nasional, terutama karena penerimaan pajak selama ini telah mampu membiayai kebutuhan belanja rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sinaga, 2010).

Kemudian selain melakukan reformasi pajak, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan defisit anggaran yang terjadi ketika total pengeluaran pemerintah (belanja negara) melebihi total penerimaan pemerintah (pendapatan negara dan hibah) (Mankiw, 2000). Dalam teori yang digagas oleh Keynes bahwa akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta konsumsi pada putaran berikutnya. dibiayai melalui utang, yang menyebabkan beban pajak pada saat ini relatif menjadi lebih ringan dan meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan. Pada periode berikutnya, peningkatan pendapatan nasional akan merangsang ekonomi melalui efek pengganda Keynesian. Karena meningkatkan tingkat konsumsi dan pendapatan secara bersamaan, tingkat tabungan dan akumulasi modal juga meningkat (Keynes, 1936; Mankiw, 1998).

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan percepatan pembangunan infrastruktur adalah sasaran utama pemerintah dalam tujuan pembangunan ekonomi nasional sehingga kebutuhan untuk modal sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Berdasarkan kebijakan umum pembangunan nasional, modal memiliki tren yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya investasi, baik investasi luar negeri maupun investasi domestik untuk membiayai pembangunan nasional (Budiyanti & Lisnawati, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan sebagai suatu acuan dalam merepresentasikan produksi dari suatu periode ke periode berikutnya dianggap sebagai parameter yang signifikan dalam menilai keberhasilan perkembangan suatu negara (Todaro,2003). Produk Domestik Bruto (PDB) dijadikan standar sebagai indikator ekonomi oleh Sistem Neraca Nasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digunakan untuk membandingkan kinerja ekonomi antar negara dalam suatu kelompok ekonomi tertentu, pengaruh faktor makroekonomi perlu dikaji secara komprehensif dalam mengetahui keterikatannya dengan nilai pertumbuhan ekonomi terutama untuk Indonesia (Wau et al., 2022).

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan keuangan, data statistik, atau hasil survei yang telah dipublikasikan. Penggunaan data sekunder memberikan beberapa keuntungan, seperti efisiensi waktu dan biaya karena peneliti tidak perlu mengumpulkan

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2428

data dari awal. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori studi kausal. Studi kausal bertujuan untuk menentukan apakah suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan sejauh mana pengaruh tersebut terjadi. Menurut (Sekaran & Bougie, 2017), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah variabel makroekonomi berupa, penerimaan pajak, defisit anggaran, nilai tukar rupiah, inflasi, dan tingkat pengangguran. Sugiyono (2016:80) menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Sampel dalam penelitian ini adalah rasio utang, rasio pajak, belanja publik, dan Produk Domestik Bruto (PDB) 1990-2022 di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil data time series antara tahun 1990-2022. Menurut Sugiyono (2018:456) dalam data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Kebijakan Utang

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa variabel makroekonomi memiliki pengaruh terhadap siklus rasio utang pemerintah. Pengaruh ini diidentifikasi dalam dua model estimasi, yaitu OLS (Ordinary Least Squares) dan ECM (Error Correction Model). Hasil perbandingan antara model OLS dan ECM menunjukkan bahwa variabel makroekonomi yaitu rasio pajak memiliki dampak signifikan terhadap penurunan rasio utang pemerintah, dengan masing-masing pengurangan sebesar 3,68 persen dan 2,10 persen. Penemuan serupa juga dilaporkan oleh Pribadi (2016) di mana instrumen pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pembiayaan melalui utang dapat dikurangi. Peningkatan pendapatan melalui pajak berpotensi mengurangi jumlah utang pemerintah karena mendorong kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan. Semakin tinggi pendapatan pajak, semakin besar potensi pemerintah untuk menangani kewajiban utangnya. Meskipun demikian, dalam jangka pendek, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan defisit anggaran melalui skema pemotongan pajak dan membiayai kegiatan dengan utang untuk mendorong memberikan stimulus pada kegiatan perekonomian demi peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini berdampak pada tingkat pengeluaran yang tinggi dan bertujuan untuk mendukung daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga terjadi peningkatan permintaan yang pada akhirnya meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam jangka panjang, skema pemotongan pajak dapat berdampak negatif pada tabungan pemerintah yang menurun dan tingkat utang yang meningkat.

Pengaruh Belanja Publik Terhadap Kebijakan Utang

Belanja publik dalam pengeluaran negara merupakan salah satu variabel makroekonomi yang dapat mempegaruhi nilai rasio utang dalam penelitian ini. Hasil estimasi Ordinary Least Square (OLS) menunjukan bahwa belanja publik menunjukan pengaruh yang negatif terhadap rasio utang dalam jangka panjang dengan nilai koefisiensi sebesar -22,03. Penelitian ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Selvia Inca Dewi pada tahun 2017 dimana pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap utang luar negeri dengan nilai regresi sebesar -0,708. Sedangkan dalam pengujian Error Correction Model (ECM) belanja publik menunjukan pengaruh yang positif dan signifikan secara jangka pendek pada nilai koefisiensi sebesar 52,98. Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik, terutama untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial, terlebih dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan upaya pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN menyebabkan kebutuhan pembiayaan akan meningkat. Dengan adanya ketimpangan pendanaan yang dialokasikan sebesar 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan program ini terlebih jika pendapatan

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2428

pemerintah dari pajak dan sumber lain tidak cukup untuk menutupi belanja ini, pemerintah mungkin perlu meningkatkan utang untuk menutupi defisit anggaran. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dapat memutuskan untuk mengabil keputusan dala, menerbitkan obligasi atau meminjam dari lembaga keuangan domestik dan internasional guna membiayai belanja tersebut. Secara keseluruhan, peningkatan belanja publik dapat memaksa pemerintah untuk meningkatkan utang yang dalam jangka panjang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak mengarah pada krisis atau gangguan ekonomi. Jika belanja publik terus meningkat tanpa adanya peningkatan pendapatan yang sebanding (misalnya melalui pajak atau efisiensi anggaran dan diversifikasi pendapatan negara), utang publik akan terus menumpuk. Ini bisa menjadi masalah besar dalam jangka panjang karena semakin banyaknya bagian dari anggaran yang harus dialokasikan untuk pembayaran bunga dan pokok utang.

Pengaruh produk domestik bruto terhadap kebijkan utang

Produk Domestik Bruto (PDB) terhadapa rasio utang yang menunjukan pengaruh negatif dan signifikan dengan hasil regresi sebesar -1,94 yang dibuktikan melalui PDB terapresiasi sebesar 1 persen terhadap penurunan rasio utang sebesar 2,6 persen dalam jangka panjang, pengaruh tersebut signifikan dengan probabilitas sebesar 0,0144. Penelitian ini didukung oleh Swamy Vighneswara (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan PDB riil berdampak negatif pada utang pemerintah, Utang negara yang dikelola dengan baik dapat mendukung pertumbuhan PDB jika digunakan untuk investasi produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, atau teknologi. Namun, jika utang digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif, atau jika beban utang menjadi terlalu besar, hal ini bisa membebani ekonomi dan menghambat pertumbuhan PDB di masa depan. Sedangkan dalam jangka pendek melalui pengujian Error Correction Model (ECM), PDB memiliki pengaruh positif pada alpha 5 persen yang menunjukan bahwa setiap terjadi kenaikan PDB sebesar 1 persen akan mempengaruhi peningkatan rasio utang sebesar 0,3 persen. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, secara jangka panjang pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukan arah yang negatif, hal ini menunjukan bahwa PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik sehingga pemerintah mendapatkan kondisi yang cukup aman dalam melakukan penambahan utang karena rasio utang terhadap PDB tetap terkendali. Secara keseluruhan, Produk domestik Bruto (PDB) memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana pemerintah Indonesia mengelola kebijakan utangnya. Pertumbuhan PDB yang kuat memberikan lebih banyak ruang bagi pemerintah untuk mengambil utang dan membiayai pembangunan, sementara PDB yang lemah membatasi kapasitas pemerintah untuk berutang tanpa meningkatkan risiko fiskal. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah faktor penting dalam menjaga keberlanjutan utang pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap kebijakan utang pemerintah Indonesia periode 1990-2022 dengan menggunakan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS) dan Error Correction Model (ECM) untuk melihat pengaruh rasio pajak, belanja publik, dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap rasio utang pemerintah secara spesifik. Model OLS digunakan untuk melihat pengaruh dalam jangka panjang, sedangkan model ECM digunakan untuk melihat pengaruh variabel makroekonomi terhadap rasio utang pemerintah dalam jangka pendek. Pada model OLS menunjukan bahwa rasio pajak,belanja publik, dan PDB menujukan pengaruh yang negatif dimana setiap peningkatan rasio pajak, belanja publik, dan PDB dapat menurunkan rasio utang. Sedangkan pada estimasi model ECM terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam jangka pendek terhadap rasio utang yaitu variabel belanja publik dan PDB. Sementara itu dalam jangka pendek variabel rasio pajak memiliki pengaruh negatif terhadap rasio utang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu untuk mengelola utang dengan baik dan secara hati-hati serta mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan negara dan sumber-sumber pembiayaan agar tidak bergantuk pada praktik utang luar negeri maupun domestik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter, dimana kebijakan fiskal digunakan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola utang negara agar tetap berkelanjutan dengan cara mengatur skema pajak dan belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter secara tidak langsung dapat mempengaruhi serta mendukung pengelolaan utang melalui beberapa mekanisme moneter dalam memberikan kontrol pengendalian laju inflasi, pengaturan suku bunga dan pengelolaan cadangan devisa yang baik.

ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
https://doi.org/10.37630/jpi.v15i3.2428

Daftar Pustaka

Budiyanti, E., & Lisnawati. (2010). Analisis Faktor Fundamental Ekonomi Yang Mempengaruhi Risiko Pinjaman Luar Negeri Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 1(1), 129–152.

Ibnu Syamsi. (1994). Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara. Bina Aksara.

Leão, P. (2013). DEBT-TO-GDP RATIO : SOME KEYNESIAN ARITHMETIC. 3, 448–465. https://doi.org/10.1111/meca.12013

Mankiw, N. Gregory. (2006). Pengantar Ekonomi Makro (edisi keti).

Mankiw, Nicholas Gregory. (2000). Teori Makro Ekonomi (Edisi keem). Erlangga.

Nunu Nugraha, Kamio, D. S. G. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Utang Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Universtas Batanghari Jambi, 21(1), 21–26. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1160

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan. In Pengembangan-Keahlian. Jakarta. Salemba Empat (Kedua). Salemba Empat. http://www.penerbitsalemba.com

Sinaga, A. R. (2010). Universitas indonesia pengaruh variabel – variabel makro ekonomi terhadap penerimaan pajak di indonesia tesis. Universitas Indonesia.

Touseef, M., Siddiqui, S., & Farah, N. (2023). Understanding the Role of Automation in Society and its Impact on Labour Market. 2(4), 543–558.

Wau, T., Sarah, U. M., Pritanti, D., Ramadhani, Y., & Ikhsan, M. S. (2022). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN : Model Data Panel Determinants of Economic Growth of ASEAN Countries : Panel Data Models. 13(28), 163–176. https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.5205.

World Bank. (2023). World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators